



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RDPD PANJA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022.
Masa Sidang ke-	: III
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD)
Dengan	: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Hari/Tanggal	: 2 Februari 2022
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Agenda acara	: Pandangan dan Tanggapan terhadap implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dalam Perspektif Mahasiswa
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	: 19 orang dari 28 orang Anggota Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none">1. BEM Universitas Gadjah Mada2. BEM Universitas Negeri Padang3. BEM Universitas Kristen Satya Wacana4. BEM Universitas Kutai Kartanegara5. BEM Universitas Indonesia6. BEM Universitas Teknologi Sumbawa

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.02 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber; BEM Universitas Gajah Mada, BEM Universitas Negeri Padang, BEM Universitas Kristen Satya Wacana, BEM Universitas Kutai Kartanegara,

BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Teknologi Sumbawa dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja MBKM Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BEM Universitas Gajah Mada, BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Kutai Kartanegara, BEM Universitas Kristen Satya Wacana, BEM Universitas Teknologi Sumbawa, dan BEM Universitas Negeri Padang, yang telah menyampaikan paparan informasi dan masukan mengenai Pandangan dan Tanggapan terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Perspektif Mahasiswa (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. BEM Universitas Gajah Mada

- a. Implementasi MBKM mampu memberikan peluang aktifitas diluar prodi untuk menambah pengalaman dan kompetensi namun belum semua perguruan tinggi siap dan belum sepenuhnya melakukan penyesuaian kurikulum secara optimal.
- b. Program MBKM masih memiliki persoalan terkait adanya ketimpangan akses terkait status Perguruan Tinggi yang berbeda, kerentanan sosial pada tempat magang seperti perlunya pencegahan pelecehan seksual, teknis pelayanan dari sisi finansial, administrasi, dan strategi pemetaan bantuan dengan adanya Pokja Pengaduan.
- c. Perlunya kebijakan yang merata dan terukur, adanya jaminan social dan keamanan yang kondusif, dan memberikan wewenang kepada organisasi mahasiswa untuk mengusulkan alternatif MBKM.

2. BEM Universitas Indonesia

- a. MBKM harus mampu memberikan kejelasan bagi Dosen terkait Insentif, KUM (Pengakuan Angka Kredit), dan Beban Kinerja Dosen, perlunya kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, dan perlunya sosialisasi dan SOP hingga tingkat Prodi.
- b. MBKM harus mampu memberikan kejelasan regulasi bagi mahasiswa terkait jaminan konversi SKS sebesar 20 SKS, perlunya sanksi bagi Perguruan Tinggi yang mempersulit konversi SKS mahasiswa, dan perlunya ketepatan waktu dalam pemberian insentif bagi mahasiswa.

3. BEM Universitas Kutai Kartanegara

- a. Program MBKM di Universitas Kutai Kartanegara belum tersosialisasi dengan baik dan belum melaksanakan MBKM. Namun demikian kegiatan magang sudah banyak dilakukan sebelumnya, seperti penelitian pengembangan desa, bina bakti, kegiatan ini sejalan dengan MBKM.
- b. Program MBKM sepakat untuk diterapkan namun perlu kejelasan regulasi agar dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

4. BEM Universitas Kristen Satya Wacana
 - a. Universitas Kristen Satya Wacana sejak tahun 2016 telah memiliki program yang selaras dengan Program MBKM yang tergambar di dalam 10 kompetensi Skenario Pola Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa (SPPM) UKSW.
 - b. Program MBKM perlu disosialisasikan bagi Perguruan Tinggi selaku pelaksana dan pelaksanaan MBKM perlu mempertimbangkan kesediaan SDM dan kesesuaian kurikulum pada perguruan tinggi.
 - c. Perlunya keselarasan dari kebijakan Kemendikbudristek tentang pemagangan hak 3 semester agar berlaku sama pada dan tidak berbeda-beda pada tiap perguruan tinggi.

5. BEM Universitas Teknologi Sumbawa
 - a. Universitas Teknologi Sumbawa telah melaksanakan program MBKM sejak tahun 2020, bahkan program magang di hampir 100 Desa, masyarakat sangat menerima mahasiswa karena mendukung program desa.
 - b. Program MBKM masih menyisakan permasalahan terkait konversi SKS, beban kerja yang berat, tidak memberikan panduan teknis yang jelas terkait mengajar yang baik dan benar.
 - c. Belum selaras dan belum ada kesinambungan Program MBKM dari Kemendikbudristekdikti ke Program Studi, untuk itu perlu sosialisasi yang jelas dan massif hinggapanduan teknisnya pada program studi agar tidak merugikan mahasiswa.

6. BEM Universitas Negeri Padang
 - a. MBKM ide luarbiasa di awal peluncuran namun faktanya dilapangan menimbulkan permasalahan baru, tidak menjawab permasalahan lama, dan cenderung melupakan langkah kecil.
 - b. Tantangan pelaksanaan Program MBKM terdapat pada perlunya perbaikan regulasi, jaminan penyelarasan perkuliahan, perlunya peningkatan infrastruktur kampus, dan integrasi digital.
 - c. Konversi SKS perlu diperjelas agar tidak merugikan mahasiswa hingga harus mengulang atau tidak diakuinya program MBKM.
 - d. Kemendikbudristek RI perlu membuat forum komunikasi dan pelibatan mahasiswa melalui BEM secara rutin dalam membahas bersama regulasi kebijakan Pendidikan.

- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
 1. Menghimbau para Mahasiswa melalui BEM agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program turunannya dan memberikan

- kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia;
2. Mendorong Kemendikbudristek RI perlu melakukan pemerataan akses perguruan tinggi khususnya program MBKM bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.
 3. Mendorong Kemendikbudristek RI melakukan perbaikan program MBKM terutama terkait kejelasan regulasi, konversi SKS, menyediakan layanan forum komunikasi bagi Mahasiswa, pencairan insentif lebih tepat waktu, dan perlunya sosialisasi MBKM lebih massif hingga program studi, agar tidak merugikan mahasiswa;
 4. Mendorong Kemendikbudristek RI agar dalam Program MBKM memberikan ruang peran kepada BEM dan organisasi intra kemahasiswaan lain untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan berupa keterlibatan dalam pengusulan proyek kegiatan alternatif MBKM yang relevan dengan Program MBKM.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.